

Pemerintah Diminta Evaluasi Berkala Industri di Jabodetabek

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan menyoroti pabrik-pabrik yang diduga melakukan pencemaran udara di sekitar Jakarta, termasuk di Tangerang Selatan yang dilaporkan menjadi kota paling berpolusi di Indonesia.

Hal ini diketahui berdasarkan catatan Nafas Indonesia, lembaga pemantau kualitas udara. Dalam catatan terbaru yang dikeluarkan oleh Nafas Indonesia, rata-rata polutan udara PM 2.5 di Tangerang Selatan pada Juli berada di angka 60 µg/m³ (mikrogram per meter kubik), naik dari 56 µg/m³.

Selain karena polutan, pembakaran sampah yang besar dan faktor banyaknya pabrik menyebabkan Tansel memiliki kualitas udara lebih buruk dibandingkan Ibukota.

Daniel mengatakan, asap dari pabrik industri juga menjadi salah satu polusi yang sangat fatal dan berdampak pada kualitas udara. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pabrik untuk tetap mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dimiliki.

"Industri sekitar Jabodetabek harus diperiksa benar, masalah Amdal dan penanganan polusinya agar sesuai aturan yang ada. Jika terbukti melanggar, Pemda harus berani ambil tindakan mencabut izin usahanya," kata Daniel dalam keterangan tertulis, Selasa (15/8).

Daniel menambahkan, pemerintah harus memprioritaskan pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar batu bara dalam menjalankan operasionalnya. Sebab, kata Daniel, batu bara melepaskan sulfur dalam bentuk gas belerang dioksida (SO₂) yang juga menghasilkan partikel karbon hitam dalam jumlah

banyak yang berdampak buruk bagi kesehatan.

"DPR mendorong pemerintah daerah untuk menggalakkan sosialisasi ke pabrik-pabrik agar tidak menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Untuk pabrik-pabrik yang masih menggunakan bahan bakar dari batu bara harus diganti dengan gas," paparnya.

Pembakaran batu bara selama satu abad terakhir telah menyebabkan bumi menjadi lebih panas. Kondisi ini membuat perubahan iklim yang mengganggu stabilitas alam. Bagi makhluk hidup khususnya manusia, partikel hasil pembakaran batu bara dapat masuk ke paru-paru dan menyebabkan penyakit pernapasan.

Daniel menyebut, industri peleburan baja menjadi salah satu penyumbang polusi udara. Dengan kondisi tersebut, pabrik-pabrik di wilayah penyangga ibukota memungkinkan polusi yang dikeluarkan oleh cerobong asap terbawa hingga ke Jakarta.

"Saya akan mendalami masalah ini, saya rasa penyebab udara jelek utamanya karena industri yang limbah polusinya dikeluarkan melalui cerobong asap dan terbawa hingga Jakarta. Terlebih ditambah musim kemarau, yang membuat kualitas udara tidak tercuri," ungkap Daniel.

Legislator Dapil Kalimantan Barat I itu juga meminta masyarakat proaktif melaporkan apabila mengetahui ada pabrik-pabrik yang melakukan pencemaran udara.

Daniel juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah responsif dengan kondisi ini. ● yan

Pengamat: WFH untuk Kurangi Polusi Udara, Bukan Solusi Tepat

JAKARTA (IM) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai penerapan bekerja dari rumah (work from home/ WFH) bukan solusi tepat untuk mengatasi polusi udara Jakarta.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan sistem kerja hibrida terhadap para aparatur sipil negara (ASN) mulai September mendatang untuk mengurangi polusi udara. Sistem kerja hibrida ini memungkinkan ASN DKI bekerja, baik secara WFH maupun WFO (work from office).

Trubus menilai penerapan WFH bukanlah solusi tepat untuk mengatasi permasalahan polusi udara di Jakarta. "Mengenai polusi ini konteks jangka pendeknya bukan WFH," kata Trubus, Selasa (15/8).

Ia memberi contoh adanya imbauan penerapan WFH bagi para pekerja pada 5-7 September 2023 bertelepon dengan KTT Ke-43 ASEAN.

Menurutnya, seolah WFH seperti obat yang tiba-tiba langsung menyembuhkan suatu masalah.

Penerapan WFH ini jangan sekadar wacana tetapi harus dievaluasi dan berkesinambungan. Kalau ingin melaksanakan WFH pemerintah perlu juga merangkul semua pihak, termasuk swasta, dengan memberikan kompensasi maupun konsekuensi jika ada pelanggaran.

Ia menuturkan Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mengoptimalkan uji emisi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 mengenai Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Menurutnya, uji emisi tidak dilaksanakan

secara sungguh-sungguh sampai sekarang.

"Terapkan uji emisi. Kalau bisa, keluaran kebijakan pembatasan usia kendaraan. Akan tetapi, itu juga butuh keberanian karena musuhnya pelaku usaha mobil, mobil bekas sama motor bekas," ujarnya.

Meski demikian, ia memahami pergub tersebut belum bisa secara optimal karena adanya keterbatasan anggaran serta kurangnya edukasi masyarakat mengenai uji emisi.

"Ini sifatnya jangka pendek. Setelah itu, ini tergantung cuaca juga sehingga orang berpikir itu sesuatu yang tidak harus dilaksanakan," tuturnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan akan menerapkan sistem kerja hibrida, yakni WFH dan WFO, terhadap para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Rencananya, sistem kerja hibrida itu mulai diberlakukan September nanti atau bulan depan.

Heru menjelaskan pegawai OPD yang bersentuhan dengan layanan masyarakat tentunya harus bekerja di kantor.

Sementara itu, OPD yang tidak berkaitan dengan pelayanan, seperti bagian perencanaan dan lainnya dapat WFH.

Heru menegaskan bahwa sistem kerja ini wajib diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Di Pemda sifatnya wajib," katanya.

Namun, Heru Budi berharap kementerian atau lembaga pemerintah lain juga bisa menerapkan sistem kerja hibrida, begitu juga dengan perusahaan swasta. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANTARA



GELADI BERSIH UPACARA HUT KE-78 RI

Kereta kencana melintas saat geladi bersih Upacara Peringatan HUT ke-78 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (15/8).

UNTUK HINDARI DAMPAK NEGATIF DARI PENCEMARAN UDARA

Masyarakat Jakarta Diimbau Batasi Aktivitas di Luar Rumah

Dalam kondisi darurat pencemaran udara saat ini, langkah yang bisa dilakukan meminimalisir aktivitas di luar rumah.

"Upayakan terlebih dahulu untuk melindungi diri sendiri. Salah satu langkah yang akan efektif yaitu bekerja dari rumah atau WFH (work from home)," kata Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM, Pramono Hadi.

JAKARTA (IM) - Masyarakat Jakarta diimbau membatasi aktivitas di luar rumah, untuk menghindari dampak negatif dari pencemaran udara.

Salah satu langkah yang paling efektif untuk meminimalisir hal tersebut seperti bekerja dari rumah.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM, Pramono Hadi, yang dikutip dari Pro3 RRI, Selasa (15/8).

Ia mengatakan dalam kondisi darurat pencemaran udara saat ini, langkah yang bisa dilakukan meminimalisir aktivitas di luar rumah.

"Dengan masa darurat seperti ini, upayakan terlebih dahulu untuk melin-

dyangi diri sendiri. Salah satu langkah yang akan efektif yaitu bekerja dari rumah atau WFH (work from home)," katanya.

Pramono mengatakan, kualitas udara yang akhir-akhir ini menjadi sorotan tersebut itu salah satunya disebabkan karena musim kemarau yang panjang.

Dari kemarau yang panjang ini, wilayah yang biasanya terdampak hujan sekarang justru lebih banyak menghadirkan kandungan udara yang tidak baik.

Kualitas udara yang tidak baik bisa dibilang berbahaya, karena kandungan yang ada bisa langsung terserap ke paru-paru. Bahkan bisa langsung menimbulkan pe-

nyakit yang mengganggu pernapasan.

Maka dari itu, Pramono mengimbau sekali untuk masyarakat menghindari keluar rumah dalam waktu lama. Selanjutnya ia meminta masyarakat menggunakan masker yang mampu menyaring udara, karena kalau tidak sama saja tidak dapat menyaring.

"Kita sebenarnya sudah punya pengalaman bagus waktu Covid-19 kemarin, kalau kita tertib pakai masker itu insya Allah dapat melindungi diri kita," katanya kembali.

Sementara itu, terkait dengan polusi yang disebabkan oleh kendaraan, ia mengungkap itu sama saja. Karena saat kemarau atau tidak asap kendaraan itu sudah menyumbang polusi ke udara.

"Jadi kendaraan juga harus dicek, emisinya memenuhi syarat atau tidak. Hal itu kalau dilakukan juga diharapkan bisa mengurangi dari polusi udara tadi," ujar Pramono.

Kebijakan bekerja dari rumah sendiri akan diwajibkan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Penjabat

Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8). Rapat tersebut dilakukan khusus membahas upaya mengatasi kualitas udara Jakarta yang memburuk akhir-akhir ini.

Imbauan Wajib Masker

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah juga berujar, semestinya Heru Budi melihat permasalahan buruknya kualitas udara dalam tataran kronis. "Sebenarnya selama ini Pj itu lihat persoalan polusi ini baru pada tataran kausituitis, tidak pada dalam tataran kronis. Harusnya kronis, karena tiap tahun berulang seperti itu," ujar Trubus saat dihubungi, Selasa (15/8).

Karena itu, Trubus menyebut Heru sudah semes-

tinya segera mengeluarkan imbauan wajib masker agar masyarakat terhindar dari paparan polusi udara. "Maka kemudian kewajiban pakai masker itu konteks *public health* itu baru karena untuk pencegahan dari diri sendiri," ucap Trubus.

Padahal, kata Trubus, imbauan berbeda dengan kebijakan yang memiliki konsekuensi panjang setelah ditetapkan. "Misal pakai masker akan harus disediakan masker gratis, maskernya dari mana? Gratis kan nanti ada pedagang mafia-mafia masker lagi seperti dulu," ucap Trubus.

"Jadi ada konsekuensi yang kemudian apa, lalu bagaimana, masker jenis apa, nanti kayak dulu lagi masker jenis apa tidak boleh, hanya masker yang diproduksi oleh salah satu industri saja ujung-ujungnya monopoli," sambung Trubus. ● yan

PASCA PENANGKAPAN TERORISME DI BEKASI Plt Wali Kota Minta Masyarakat Waspada Pendatang

BEKASI (IM) - Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto turut merespon adanya penangkapan pemuda berinisial DE (27) dari tim Dataselem khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, di Perumahan Pesona Anggrek, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Senin (14/8).

Ia meminta seluruh warga masyarakat di Kota Bekasi untuk mewaspadai para pendatang dengan cara mengecek identitas dengan teliti.

"Tentunya waspada terkait dengan pendatang yang hadir, untuk itu para Ketua RT dan RW megang peranan penting," ujar Tri Adhianto, Selasa (15/8).

Dari hal itu, perangkat di wilayah dapat melakukan identifikasi sosok yang akan masuk atau tinggal mengontrak di Kota Bekasi.

"Untuk kemudian bersama-sama untuk mengidentifikasi terlihat bahwa biasanya kan memang dari hasil yang ada orang-orang

yang datang itu biasanya tertutup," jelasnya.

Dirinya berharap Pemerintah Kota Bekasi juga dapat memberikan rasa aman dengan cara melakukan edukasi lingkungan dengan menerapkan pola sosialisasi kerukunan agama yang tepat.

"Ya kalo kita tentunya akan terus melakukan edukasi, literasi pada warga masyarakat untuk kita menjaga terus hidup harmonisasi yang ada," pungkasnya.

Diketahui, Densus 88 menangkap pemuda berinisial DA (27), DA merupakan warga pendatang yang baru tinggal selama enam bulan di rumah kontrakan Perumahan Pesona Anggrek, Bekasi Utara.

Tim Densus 88 kemudian, menyita sejumlah barang bukti dari beragam senjata api, buku pedoman agama, ransel peluru aktif, laptop, kamera DSLR hingga bendera ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). ● yan

Cegah Banjir, 352 Kubik Lumpur Dikeruk dari Kali Pesanggrahan Jakbar

JAKARTA (IM) - Sebagai upaya menanggulangi banjir, Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Barat mengeruk lumpur Kali Pesanggrahan sepanjang 389 meter. Kali tersebut, melintasi Kecamatan Kembangan hingga Kebon Jeruk.

Kepala Sudin SDA Jakarta Barat, Purwanti mengatakan, pihaknya telah mengeruk sebanyak 352 kubik lumpur selama empat hari pengerjaan.

"Untuk tahap awal kami kerahkan dua unit ekskavator dan empat unit truk untuk mengangkut lumpur," ujar Purwanti dikutip dalam laman resmi Pemprov DKI, Selasa (15/8).

Pengerukan tersebut, kata Purwanti, dilakukan sedalam 3,5 sampai empat meter. Rencananya, pada pekan depan pihaknya akan menambah dua ekskavator jenis amfibi serta truk untuk mengangkut lumpur guna mempercepat

pengerjaan.

"Pengerukan dilakukan agar daya tampung sungai menjadi lebih banyak dan aliran air dapat mengalir lancar sehingga diharapkan dapat meminimalisir genangan saat musim hujan," imbuhnya.

Adapun pengerukan tersebut ditargetkan pengerjaan pengerukan Kali Pesanggrahan sepanjang 389 meter ini akan rampung hingga enam bulan ke depan. ● yan

FOTO: ANTARA



NERACA PERDAGANGAN HINGGA JULI SURPLUS

Kapal nelayan melintas belatar belakang suasana bongkar muat peti kemas di New Priok Container Terminal One, Jakarta Utara, Selasa (15/8). Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus selama 39 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 dengan nilai sebesar 1,31 miliar dolar AS pada Juli 2023.

PENGUMUMAN

Bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 1, tanggal 1 Agustus 2023 PT. GARDIA BINA UTAMA (selanjutnya disebut "Perseroan") yang dibuat dihadapan Kamsiana Datu Rumenggan, SH., Notaris di Karawang, telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Perseroan untuk peningkatan modal Perseroan menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang mana petyetorannya dilakukan dengan Konversi Hutang yang dimiliki oleh Perseroan kepada para pemegang saham untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga modal yang disetor Perseroan berjumlah Rp. 1.790.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

Demikian pengumuman ini dibuat dan diterbitkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 16 Agustus 2023
Direksi PT Gardia Bina Utama

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa PT SERTIFIKASI USAHA KELISTRIKAN, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") telah dibubarkan, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 011, tanggal 10 Agustus 2023, dibuat dihadapan ROSDIANA, SH., Notaris di Kota Bekasi dan diangkat Tuan Insinyur DHARMA BAKTI, Direktur Perseroan sebagai Likuidator, yang beralamat di Ruko Villa Melati Mas Square Blok A1 nomor 20 lantai 2, Jalan Raya Serpong, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

Kepada Para kreditur Perseroan dimohon untuk mengajukan tagihan dengan disertai bukti yang sah dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator. Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 16 Agustus 2023.
PT SERTIFIKASI USAHA
KELISTRIKAN
Likuidator